

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata kini menjadi salah satu sektor andalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, tidaklah heran jika pengembangan pariwisata yang dilakukan berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat di sekitarnya. Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerahnya melalui Perda No. 25 Tahun 2002 (Valeriani, 2016: 3). Sektor ini mulai dilirik manakala sektor pertambangan (timah) yang ada di Bangka Belitung tidak lagi mampu menjadi primadona untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang, juga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini didukung dengan keberadaan 47 destinasi wisata yang ada di kota ini dan sangat potensial untuk dikembangkan. Adapun 47 destinasi wisata tersebut terbagi dalam 6 jalur destinasi wisata pesisir, 21 jalur destinasi wisata sejarah, 15 jalur destinasi wisata budaya, dan 5 jalur destinasi wisata olahraga (Selamat Datang di Pangkalpinang Kota Pangkal Kemenangan, 2015: 3-4).

Dalam upaya pengembangan wisata, pembangunan dan perbaikan aksesibilitas wisata tentu menjadi poin penting untuk dilakukan. Soekadijo (Bunggaran dkk., 2017: 63) menyatakan bahwa pengembangan ini tidak hanya dilakukan pada atraksi dan objek wisata saja, namun juga pada sarana akomodasi, termasuk di dalamnya fasilitas, pelayanan, tarif, dan lokasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang perjalanan wisatawan (Dewa, 2013: 1).

Berbicara tentang pengembangan wisata tidaklah terlepas dari peran masyarakat sebagai penikmat wisata. Berwisata merupakan hak setiap warga negara. Tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Tidak hanya itu, kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan wisata bagi penyandang disabilitas secara lebih spesifik, juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khususnya dalam pasal 5 ayat 1 butir k yang berbunyi, *“penyandang disabilitas memiliki hak: kebudayaan dan pariwisata”*.

Pada kenyataannya, jaminan negara untuk dapat menikmati perjalanan wisata bagi penyandang disabilitas, tampaknya belum mampu dirasakan seutuhnya. Hal ini dibuktikan dengan minimnya aksesibilitas wisata yang disediakan bagi penyandang disabilitas di tempat-tempat wisata yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, dari 47 destinasi wisata yang dikembangkan hanya ada beberapa aksesibilitas wisata saja yang telah disediakan. Aksesibilitas wisata

sebagaimana dimaksud tersebar di tiga tempat wisata, seperti Tamansari, Stadion Depati Amir, dan Museum Timah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno Feriansyah pada tahun 2014, minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini tidak hanya terjadi pada tempat-tempat wisata saja, namun juga pada pelayanan publik yang disediakan di kota ini. Keadaan ini tentu akan menghambat penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya.

Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek-objek wisata. Ini berarti bahwa pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas paling tidak sekitar 50% atau setengahnya dari jumlah destinasi wisata yang ada. Penyediaan aksesibilitas ini penting dilakukan guna membangun sikap kemandirian penyandang disabilitas, mengingat jumlah penyandang disabilitas yang ada tidaklah sedikit. Data dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa pada tahun 2017 terdapat sebanyak 969 orang penyandang disabilitas yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang, dari total penduduk sebanyak 196.202 jiwa (BPS Kota Pangkalpinang, 2017).

Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang juga telah menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata yang mengacu pada konsep pariwisata berkelanjutan (RIPPDA Kota Pangkalpinang, 2013: 180-181).

Konsep ini menempatkan permasalahan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan dan orientasi dalam pembangunan pariwisata. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini seharusnya mampu menjadi bukti dari penerapan konsep pengembangan pariwisata yang dicanangkan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam usaha pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pariwisata, guna mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Beribu Senyuman (Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur). Berdasarkan *tagline* tersebut diharapkan senyuman yang ada, tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, namun juga bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang juga memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan daerah (Direktori Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2015: 6; RIPPDA Kota Pangkalpinang, 2013: 2). Berdasarkan hal tersebut, Kota Pangkalpinang seharusnya mampu menjadi contoh dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang dilakukan. Salah satunya melalui pemenuhan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas yang dilakukan sesuai dengan *branding* kota yang dicanangkan. Kondisi ini juga menjadi penting mengingat pada tahun 2014 Kota Pangkalpinang berhasil meraih penghargaan di bidang pariwisata sebagai *The Best Achievement* dalam acara *Travel Club Tourism Award* (TCTA) (Wonderful Pangkalpinang, 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus persoalan yang akan ditelusuri lebih jauh dalam penelitian ini yaitu mengenai “Bagaimana pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata sensitif disabilitas di Kota Pangkalpinang?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata sensitif disabilitas di Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah inventarisasi ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam kajian sosiologi, yakni sosiologi pariwisata. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan serupa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan menjadi acuan atau literatur bagi mahasiswa, tenaga pendidik, cendekia, dan masyarakat umum berkenaan dengan permasalahan disabilitas dalam bidang pariwisata. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi para *stakeholder* selaku pembuat kebijakan dalam

pemberdayaan penyandang disabilitas, sekaligus menjadi pemantik bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan tema-tema tentang pariwisata dan disabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diawali dengan studi literatur terkait dengan permasalahan disabilitas, baik itu penelitian sebelumnya atau wacana terkait. Penelitian ini juga disertai dengan berbagai diskusi dan pra-observasi untuk melengkapi gambaran tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, guna memperkuat argumen peneliti.

Pada bagian *pertama* yaitu bagian pendahuluan, terdapat beberapa tahap yang dijelaskan. Dimulai dari latar belakang yang berisi alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap topik yang dipilih. Sesuai dengan topik tersebut, maka latar belakang penelitian ini adalah mengenai pengembangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada objek wisata di Kota Pangkalpinang.

Bagian pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Lalu, terdapat pula manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis dari hasil penelitian ini, serta sistematika penulisan penelitian.

Bagian *kedua* yaitu tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teoretik yang berisi penjabaran teori yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Kemudian operasionalisasi konsep yang menjabarkan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya alur berpikir. Alur berpikir dibuat untuk memudahkan peneliti dalam mengurutkan alur pikir penelitian. Terakhir ialah penelitian terdahulu yang berisi kesimpulan dari literatur penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti.

Selanjutnya, bagian *ketiga* metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian. Metodologi penelitian mencakup desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, subjek dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Kota Pangkalpinang dengan subjek penelitian tentang aksesibilitas wisata sensitif disabilitas.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Bagian *keempat* berisi gambaran umum terkait objek penelitian. Bagian ini diawali dari penjabaran mengenai Kota Pangkalpinang secara geografis dan administratif. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran mengenai

komposisi penduduk Kota Pangkalpinang. Gambaran umum objek penelitian kemudian dilanjutkan dengan penjabaran mengenai gambaran umum penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang, serta gambaran umum terkait wisata di Kota Pangkalpinang.

Berikutnya, bagian *kelima* pembahasan. Bagian ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan diawali dari penjabaran mengenai rincian aksesibilitas wisata yang sudah disediakan bagi penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai bagaimana intensitas pemanfaatan aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas. Terakhir, bagian pembahasan akan memaparkan penyebab penyandang disabilitas khususnya tunadaksa menjadi kelompok *subaltern* dalam masyarakat pada umumnya.

Terakhir, bagian *keenam* penutup. Bagian ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian. Bagian ini juga akan mencantumkan saran berupa rekomendasi bagi pihak-pihak terkait terhadap permasalahan disabilitas.